

DAFTAR PUSTAKA

- Program Pascasarjana Universitas Indonusa Esa Unggul, 2007, *Pedoman Penyusunan Tesis*, Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.
- Sumarto, Hetifah Sj., 2009, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung.
- Dunn, William N., Muhadjir Darwin (penyunting), 2001, *Analisis Kebijaksanaan Publik: Kerangka Analisis Dan Prosedur Perumusan Masalah*, Hanindita, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 1991, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Bandung.
- Wibawa, Samudra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ismaly, M. Irfan, 2000, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, MedPres, Yogyakarta.
- Hadisaputra, Mandar Trisno, SE., MM., 2014, *Mudah Membaca Perpres 70 Tahun 2012*, Simetris Printing and Design, Serang.
- Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan, Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 2015, *Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Bimbingan dan Layanan Pengadaan, Jakarta.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Volume 1 Number 1 Desember 2011, *Jurnal Pengadaan "Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, LKPP, Jakarta
- Suswinarno, Ak., MM., 2012, *Aman dari Resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visi Media Pustaka, Jakarta.
- Ramli, Samsul, 2014, *Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visi Media Pustaka, Jakarta.
- Sutisna, Nandang, *Konsolidasi Perpres 54/2010 Sampai Perubahan Keempat*. 2010. <http://www.nandangsutisna.com/...>, Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1559/KM.1/2011 Tanggal 29 Desember 2011 Tentang Uraian Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 1106/KM.1 8 November 2012 Tentang

- Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 Tanggal 23 Juli 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tanggal 7 Mei 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 Tanggal 2 Februari 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan.
- Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1270/SJ/2012 Tanggal 25 Juni 2012 Hal : Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Muhammad Arifin Siregar, S.Sos, Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Misroji, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai Depok Cyber City pada Diskominfo Kota Depok, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2012.

[http://www.academia.edu/7739152/Pengertian Dan Peranan Sumber Daya Manusia 3 0 4137](http://www.academia.edu/7739152/Pengertian_Dan_Peranan_Sumber_Daya_Manusia_3_0_4137)

[http://www.academia.edu/8634744/A. PENGERTIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR](http://www.academia.edu/8634744/A._PENGERTIAN_STANDAR_OPERASIONAL_PROSEDUR)

[http://www.academia.edu/3075559/Teori Organisasi](http://www.academia.edu/3075559/Teori_Organisasi)

[http://www.academia.edu/6688520/IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK](http://www.academia.edu/6688520/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK)